PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Ni Made Widiyanthi

*Email:* [*nimadewidiyanthi@gmail.com*](mailto:nimadewidiyanthi@gmail.com)

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta*

# **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan SKPD di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer, data dari kuesioner yang diukur menggunakan skala *liket.* Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh OPD yang ada di bagian keuangan di Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling*, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 58 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebar kuisioner yang kemudian diolah menggunakan SPSS dengan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan SKPD, Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan SKPD, dan Akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan SKPD.

**Kata Kunci**: Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan.

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the effect of the use of regional financial accounting information systems, transparency and accountability on financial management of SKPD in Sleman Regency. The research method used is quantitative with primary data, data from the questionnaire which is measured using a pickle scale. The population in this study were all OPDs in the financial division of Sleman Regency. The sample collection method was carried out using purposive sampling, the number of respondents in this study were 58 respondents. The research data were collected by distributing questionnaires which were then processed using SPSS with descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the use of the Regional Financial Accounting Information System partially has no positive and significant effect on SKPD Financial Management, transparency partially has a positive and significant effect on SKPD financial management, and accountability partially has no positive and significant effect on SKPD Financial Management.*

***Keywords****: Regional Financial Accounting Information System, Transparency, Accountability, Financial Management.*

**PENDAHULUAN**

*Accounting Information System* (AIS) awalnya difokuskan pada pencatatan, peringkasan validasi data tentang transaksi keuangan bisnis. Sistem akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Oleh karena itu, peningkatan teknologi informasi telah memfasilitasi penggunaan prosedur akuntansi biaya dan manajemen. Perkembangan Teknologi Infomasi telah menjadi hal terpenting dalam dekade terakhir dan telah memimpin perkembangan dalam globalisasi pasar dan masyarakat (Salehi, 2010).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pasal 32 mengatur bahwa Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APD). Laporan keuangan pemerintahan merupakan hak publik yang harus diberi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mardioso (2010), aksesibilitas laporan keuangan yang akan diberikan kepada publik dan pihak lainnya memiliki kepentingan dengan laporan keuangan daerah memungkinkan adanya pengawasan dan umpan balik yang lebih fleksibel mengenai kemudahan akses, dan dapat digunakan untuk koreksi atau implementasi tata kelola yang baik bagi pemerintah daerah. Aksesibilitas tersebut dapat diberikan melalui media seperti koran, majalah, radio, stasiun televisi dan website. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan menyajikan informasi keuangan daerah kepada publik.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dasar pelaporan keuangan pemerintah dan merupakan tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Prinsip transparansi artinya seluruh instansi pemerintahan harus terbuka kepada publik dalam hal pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan maupun yang berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki askes untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Sedangkan prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan setiap tugas, penggunaan sumber daya dan penggunaaan kewenangan harus ditinjau oleh lembaga independen.

Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan kepala daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan meminta kepada kepala SKPD untuk membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakan. Bentuk pertangungjawaban ini bukan dalam bentuk surat pertanggungjawaban, melainkan dalam bentuk laporan keuangan.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 3.2. tahun 2017 tentang Peruabahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan sendiri. Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara efektif dan efesien, tepat waktu, cepat dan tentunya data yang dihasilkan lebih akurat.

Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) merupakan Sistem Informasi Akuntansi aplikasi komputerisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Kabupaten Sleman yang digunakan untuk menyusunan laporan keuangan secara terkomputerisasi, sistem informasi yang dibuat diharapkan mampu mempermudah penyusunan laporan keuangan dan mampu memberi manfaat bagi pemerintah agar mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan suatu penerapan yang sistematis, mulai dari pengelompokkan, pengklasifikasian, pencatatan dan pengolahan kegiatan keuangan pemerintah daerah hingga laporan keuangan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Teori Keagenan *(Agency Theory***

Asimetri informasi merupakan bentuk dua pihak yang akan membuat kesepakatan atau kontrak dengan masalah, hal ini di gambarkan oleh teori keagenan. Di dalam sektor publik, informasi yang lebih banyak dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik pemerintahan publik, hal tersebut dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang hanya melibatkan pemerintahan dan otoritas serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Selaku agen yang diamanahi oleh prinsipal, maka Bupati dan Wakil Bupati harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Saat mengurus tugas, Bupati dan Wakil Bupati adalah pihak yang terinformasi dari pihak prinsipal. Dalam rangka pengendalian pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus (sekretaris daerah, kepala SKPD, dan kepala lembaga), laporan keuangan daerah yang disusun merupakan mekanisme pertanggungjawaban dan tanggung jawab yang jelas atas kinerja Bupati sebagai badan pelaksana. Pengelolaan keuangan daerah kemudian dikomunikasikan sebagai tanggung jawab Bupati kepada rakyat.

**Pengelolaan Keuangan SKPD**

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 bahwa Laporan Keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan pada suatu entitas. Disamping itu juga termasuk jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, maka Satuan Kerja Perangkat Daaerah diwajibkan menyusun laporan keuangan pemerintah yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya dengan baik. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menganalisis rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

**Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintahan serta memudahkan pegendalian efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Yuliani, *et al* (2010) bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan aplikasi untuk pengelolaan keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Teori keagenan relevan untuk menjelaskan adanya hubungan teori tersebut dengan penjelasan mengenai hubungan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan SKPD. Dalam pengelolaan laporan keuangan SKPD sebagai yang melaporkan dan menyusunan laporan keuangan perlu memanfaatkan sistem informasi yang telah disediakan agar mempermudah dalam pengelolaan keuangan SKPD.

H1 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan tehadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan informasi yang disediakan dengan cukup akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan publik, serta proses pembentukannya. Informasi merupakan sesuatu yang didapatkan oleh masyarakat yang merupakan kebutuhan penting agar mampu berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya informasi maka masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi laporan keuangan, agar kebijakan publik yang muncul memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, hal tesebut dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manupulasi yang dapat menguntungkan salah satu pihak saja.

Teori keagenan relevan untuk menjelaskan bahwa pemeritah berkewajiban memberikan transpransi pengelolaan keuangan selama periode jabatannya kepada masyarakat, karena masyrakat memiliki hak yang kuat menerima transparansi oleh pemerintah. Gedeona (2005) menyatakan bahwa jika prinsip transparansi dibiarkan berlangsung tanpa transparansi merupakan hal yang terlalu berbahaya, sehingga ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan penekanan prinsip transparansi menggunakan transparansi.

H2 : Transpransi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Akuntabilitas**

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa ada dua macam akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber dana kepada otoritas yang mempunyai wewenang lebih tinggi, misalnya: pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat baik melalui lembaga perwakilan rakyat maupun secara langsung.

Teori keagenan relevan dalam menjelaskan bahwa pemerintah harus menjadi akuntabel dalam pengelolaan keuangan SKPD dalam mempublikasikan hasil penyajian laporan yang telah dibuat. Secara umum dalam setiap pengelolaan keuangan daerah selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Keterkaitan akuntabilitas dengan pengelolaaan keuangan dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik.

H3 : Akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)

Transparansi (X2)

Akuntabilitas (X3)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Teoritis**

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksud dengan tujuan menggambarkan kejadian-kejadian apa adanya. Jenis penelitian deskriptif berbeda dengan eksperimen dimana pada penelitian ini tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel bebasnya. Penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman yang berjumlah 48 Kelembagaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah OPD yang berbentuk Dinas dan Inspektorat/Badan karena dianggap dapat mewakili OPD lainnya yang berjumlah 29 OPD. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 29 OPD yang terdiri dari 21 Dinas, 1 Inspektorat dan 5 Badan yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan, yaitu 2 orang dari setiap OPD yang memenuhi kriteria untuk dijadikan responden, sehingga jumlah responden sebanyak 58 orang.

**HASIL UJI**

Dalam. penelitian ini. karakteristik.responden yang dapat di. golongkan. Berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan masa kerja. Berdasarkan. karakteristik tersebut maka dapat. Di simpulkan. bahwa. jenis kelamin. dominan perempuan berjumlah 39 orang atau 68,4%, laki-laki 18 orang atau 31,6%. Kemudian.rata-rata usia 20-30 sebanyak 3 orang atau 5,3%, usia 31-40 sebanyak 17 orang atau 29,8%, usia 41-50 sebanyak. 27 orang atau 47,4% kemudian.usia. diatas 50 tahun. sebanyak 10 orang atau 17,%. Kemudian di lihat dari tingkat pendidikan SLTA sebanyak 12 orang atau 21,1%, Diploma sebanyak. 3 orang atau 5,3%, tingkat. pendidikan. S1 sebanyak 31 orang atau 54,4%, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 11 orang atau 19,3%. Dari hasil.uji validitas. dari semua item dan pernyataan.dikatakan Valid. sehingga semua.item dapat. digunakan untuk. dianalisis lebih lanjut, hal. ini dapat di.tunjukan dengan. nilai korelasi r hitung. lebih besar dari r . tabel sebesar 0,3610. Kemudian. Dilihat dari hasil uji. reabilitas penelitian. ini dikatakan. reliable karena. memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel sebesar 0,3610.

Variabel Pengelolaan Keuangan SKPD memiliki nilai minimum 27, nilai maximum 40, nilai rata-rata 34.16 dan standar deviasi 3.463. Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai minimum 22, nilai maximum 40, nilai rata-rata 25.86 dan standar deviasi 2.628. Variabel Transparansi memiliki nilai minimum 32, nilai maximum 45, nilai rata-rata 38.33 dan standar deviasi 3.975. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai minimum 31, nilai maximum 45, nilai rata-rata 38.25 dan standar deviasi 4.090.

| **Tabel 1**  **Descriptive Statistics** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Pengelolaan Keuangan SKPD | 57 | 27 | 40 | 34.16 | 3.463 |
| Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah | 57 | 22 | 30 | 25.86 | 2.628 |
| Transparansi | 57 | 32 | 45 | 38.33 | 3.975 |
| Akuntabilitas | 57 | 31 | 45 | 38.25 | 4.090 |
| Valid N (listwise) | 57 |  |  |  |  |

*Sumber: Data primer diolah, 2020*

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas Data**

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah model regresi pada nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik menghasilkan data normmal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan terhadap variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan SKPD dengan uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test.* Hasil uji dapat dikatakan normal jika nilai *Asymptotic significant* > 0,05.

| **Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Data Setelah Outlier One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  | Unstandardized Residual |
| N | | 41 |
| Normal Parametersa | Mean | .0418694 |
| Std. Deviation | 1.61340325 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .189 |
| Positive | .104 |
| Negative | -.189 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.207 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .108 |
| a. Test distribution is Normal. | |

*Sumber: Data primer diolah, 2020.*

Pada uji normalitas yang dilakukan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai uji *Kolmogorov-smirnov* dengan nilai 0.000 yang berarti nilai signifikan < 0,05. Sehingga peneliti perlu melalukan outlier sebanyak 16 data, yang berarti sebelumnya N berjumlah 57 menjadi 41. Setelah dilakukan outlier data maka data dapat dinyatakan normal dengan nilai signifikan 0,108. Berdasarkan hasil uji normalitas data setelah outlier pada tabel diatas menunjukkan bahwa Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,108 yang berarti > 0,05. Sehingga dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. Multikolinearitas terjadi apabila antar variabel independen terdapat hubungan yang dignifikan. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi dan menunjukkan kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum yang dipakai adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan VIF < 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Berikut hasil pengujian multikolinearitas.

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas**

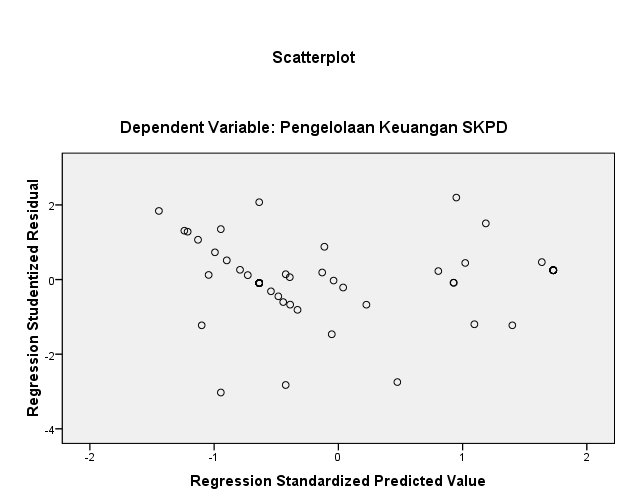
| Model | | Collinearity Statistics | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolerance | | VIF |
| 1 | (Constant) |  | |  |
| Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah | .226 | | 4.434 |
| Transparansi | .215 | | 4.646 |
| Akuntabilitas | .273 | | 3.663 |
| a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan SKPD | |  |

*Sumber: Data primer diolah, 2020*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas, secara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam variabel regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika titik-titik *scatterplot* membentuk pola tertantu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik menyebar maka tidak terdapat heteroskedastisitas.



**Gambar 1 *Scatter Plot* Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan hasil output pada gambar diatas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di daerah + dan – serta tidak membentuk pola, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak ada masalah heteroskedastisitas. Data penelitian yang baik adalah data yang tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Uji Regresi Linear Berganda**

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Dengan menggunakan bantuan SPSS hasil sebagai berikut:

| **Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 1.996 | 1.924 |  | 1.037 | .304 |
| Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah | .292 | .150 | .222 | 1.946 | .057 |
| Transparansi | .491 | .102 | .563 | 4.825 | .000 |
| Akuntabilitas | .151 | .088 | .179 | 1.723 | .091 |
| a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan SKPD | | | |  |  |  |

*Sumber: Data primer diolah, 2020*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel diatas yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Y = 1,996 + 0,292X1 + 0,491X2 + 0,151 X3 + ε

**Uji Regresi Parsial**

Uji t-test digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Arah pengaruh variabel berdasarkan nilai koefisien regresinya. Jika nilai koefisiennya positif, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisiennya negatif, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

| **Tabel 5 Hasil Uji Regresi Parsial**  **Coefficientsa** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 1.996 | 1.924 |  | 1.037 | .304 |
| Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah | .292 | .150 | .222 | 1.946 | .057 |
| Transparansi | .491 | .102 | .563 | 4.825 | .000 |
| Akuntabilitas | .151 | .088 | .179 | 1.723 | .091 |
| a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan SKPD | | | |  |  |  |

*Sumber: Data primer diolah, 2020*

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Pengaruh variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 1,946 dengan signifikansi sebesar 5% nilai ttabel untuk jumlah data sebanyak 57 (n) dan jumlah variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) sebanyak 4 dengan taraf signifikan 5%, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,0057. Jika thitung > ttabel maka variabel tersebut dinyatakan signifikan, namun jika thitung < ttabel dinyatakan tidak signifikan. Pada tabel diatas menunjukkan nilai 1,946 < 2,0057. Maka keputusannya H1 ditolak, karena variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1. Pengaruh variabel Transparansi (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 4,825 dengan signifikansi sebesar 5% nilai ttabel untuk jumlah data sebanyak 57 (n) dan jumlah variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) sebanyak 4 dengan taraf signifikan 5%, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,0057. Jika thitung > ttabel maka variabel tersebut dinyatakan signifikan, namun jika thitung < ttabel dinyatakan tidak signifikan. Pada tabel diatas menunjukkan nilai 4,825 > 2,0057. Maka keputusannya H2 diterima, karena variabel Transparansi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1. Pengaruh variabel Akuntabilitas (X3) terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 1,723 dengan signifikansi sebesar 5% nilai ttabel untuk jumlah data sebanyak 57 (n) dan jumlah variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) sebanyak 4 dengan taraf signifikan 5%, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,0057. Jika thitung > ttabel maka variabel tersebut dinyatakan signifikan, namun jika thitung < ttabel dinyatakan tidak signifikan. Pada tabel diatas menunjukkan nilai 1,723 > 2,0057. Maka keputusannya H3 diterima, karena variabel Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)**

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 1,946 dengan signifikansi sebesar 5% nilai ttabel untuk jumlah data sebanyak 57 (n) dan jumlah variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) sebanyak 4 dengan taraf signifikan 5%, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,0057. Jika thitung > ttabel maka variabel tersebut dinyatakan signifikan, namun jika thitung < ttabel dinyatakan tidak signifikan. Pada tabel diatas menunjukkan nilai 1,946 < 2,0057. Maka keputusannya H1 ditolak, artinya bahwa variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Didukung dengan teori keagenan dimana peran pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab kepada *stakeholder* harus menyajikan sebuah informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak agen adalah dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang terkomputerisasi dengan baik dan memenuhi karakteristik kulitatif sehingga menghasilkan informasi mengenai keuangan dengan baik, yang disajikan oleh pemerintah daerah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pengguna laporan keuangan.

**Pengaruh Transparansi (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)**

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 4,825 dengan signifikansi sebesar 5% nilai ttabel untuk jumlah data sebanyak 57 (n) dan jumlah variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) sebanyak 4 dengan taraf signifikan 5%, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,0057. Jika thitung > ttabel maka variabel tersebut dinyatakan signifikan, namun jika thitung < ttabel dinyatakan tidak signifikan. Pada tabel diatas menunjukkan nilai 4,825 > 2,0057. Maka keputusannya H2 diterima, artinya bahwa variabel Transparansi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Variabel Transparansi bepengaruh positif karena didukunh dengan teori keagenan dimana pemerintah berkewajiban memberi transparansi pengelolaan keuangan selama periode jabatannya kepada masyarakat, karena masyarakat memiliki hak yang kuat menerima transparansi oleh pemerintah. Ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan penekanan prinsio transparansi karena terlalu berbahaya untuk dibiarkan berlangsung secara transparansi.

**Pengaruh Akuntabilitas (X3) terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)**

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 1,723 dengan signifikansi sebesar 5% nilai ttabel untuk jumlah data sebanyak 57 (n) dan jumlah variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) sebanyak 4 dengan taraf signifikan 5%, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,0057. Jika thitung > ttabel maka variabel tersebut dinyatakan signifikan, namun jika thitung < ttabel dinyatakan tidak signifikan. Pada tabel diatas menunjukkan nilai 1,723 > 2,0057. Maka keputusannya H3 diterima, artinya bahwa variabel Akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Teori keagenan relevan bahwa pemerintahan harus menjadi akutabel dalam pengelolaan keuangan SKPD dalam mempublikasikan hasil penyajian laporan yang telah dibuat. Secara umum setiap pengelolaan keuangan daerah selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Keterkaitan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik.

**KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemanfaaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Transparans, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil penelitian yang telag diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Hasil pengujian H1 ditolak, menunjukkan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Hasil Pengujian H2 diterima, menunjukkan bahwa Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Hasil Pengujian H3 diterima, menunjukkan bahwa Akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**SARAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberi kontribusi dalam mempengaruhi implikasi berbagai bidang. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini: 1)Bagi pihak Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman khususnya bagian akuntansi dan penatausahaan keuangan untuk memaksimalkan penggunaan kecanggihan teknologi untuk pemanfaatan sistem informasi akuntansi khususnya aplikasi Sistem Infomasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA). Meningkatkan lagi transparansi pengelolaan keuangan dengan menginformasikan setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban kepada publik. Serta pemerintah perlu lebih akuntabel dalam pengelolaan keuangan dalam mempublikasikan hasil penyajian laporan yang dibuat. Diharapkan dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, tercipta pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik. 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal, serta menambah variabel mengenai pengelolaan anggaran daerah dan menambah elemen dari *good corporate governance* yaitu responsibilitas, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran*.* Kemudian diharapkan untuk menambah keakuratan hasil penelitian dapat ditambah metode, selain kuisioner dapat ditambah dengan metode wawancara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustipa, Mila. 2019. “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Medan. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Albugis, Febriana F. 2016. “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.3.

Al-Hiyari, A., M. H. H. Al-Mashregy, N. K. N. Mat, dan J. M. Allekam. 2013. Factors that Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia. American Journal of Economics, 3 (1), 27-31.

Erlanda, Rina. 2016. “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah ( Studi pada Pemerintah Kota Se-Sumatera)”. *Jurnal Akuntansi &* Keuangan. Vol. 7 No. 2.

Lestari, Utami Puji. 2020. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus OPD Kabupaten Kendal)”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis.* Vol. 7 No. 1.

Mahayuni, Ni Putu Sri, Gede Adi Yuniarta, I Putu Julianto. 2017. “Pengaruh Pemanfaatan Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem”. *Jurnal Akuntansi.* Vol. 8 No.2.

Putra, Gerryan. 2017. “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”. *JOM Fekon.* Vol. 4 No. 1.

Putri, Dini Ariani. 2020. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Study Empiris pada SKPD Kabupaten Lombok Tengah)”. *E-JRA.* Vol. 09 No. 03.

Saputra, Berry Wan. 2015. “Pengaruh Impelentasi Standar Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kota Pekanbaru)”. *Jom. Fekon.* Vol. 2 No. 2.

Yanti, Nanda Saputri, 2020. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaha, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang)”. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi.* Vol. 8 No 1.